



Tugu Jogja Expo Digelar tanpa Izin



PERIZINAN DISOAL: Warga dan wisatawan berkunjung di pasar malam Tugu Jogja Expo (TJE) 2022-2023, Jalan Margo Utomo, Jogja, kemarin (12/12). Event itu untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) namun digelar tanpa izin Pemkot Jogja.

Hasto: Tak Keluar Rekomendasi Itu Jadi Hal Sepihak

JOGJA, Radar Jogja - Tugu Jogja Expo (TJE) 2022-2023 digelar tanpa izin. Kegiatan ini diinisiasi

Sekber Keistimewaan DIJ dan Republik Altar Ria guna menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Padahal lokasi yang digunakan berada di sumbu filosofis, tepatnya di Jalan Margo Utomo atau Jalan P Mangkubumi yang bersebelahan kantor PLN di lahan eks Hotel Triu

► Baca Tugu... Hal 7

BERLANGSUNG MULAI 8 DESEMBER 2022 - 8 JANUARI 2023

Tanggapan PJ Wali Kota Jogja
Sumadi

- Akan segera menindak.
- Tidak direkomendasikan karena ada sejumlah potensi, antara lain, timbulnya kemacetan karena minimnya lahan parkir dan berpotensi mengancam cagar budaya Hotel Tugu.
- Dipertanyakan lantaran penyelenggaraan acara tidak berlokasi di dekat Hotel Tugu.

Tanggapan Ketua Penyelenggara TJE
Widihasto Wasana Putra

- Menurutnya, kalau pun pertimbangannya adalah faktor kemacetan bisa mengganggu sumbu filosofis, pun tanpa adanya even TJE dinilai kawasan tersebut sudah padat.
- Terlebih, publik dianggap sudah mengetahui hal itu bahwa Jogja selalu padat kendaraan saat musim-musim liburan karena memang sejauh ini Pemkot belum menyediakan kantong-kantong parkir.
- TJE telah memplotkan space parkir di dalam area. Even temporer dan tidak permanen.



GRAFIK: HESTI KARTUNEGARA/JOGJA

Tugu Jogja Expo Digelar tanpa Izin

Sambungan dari hal 1

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi menegaskan, TJE tidak berizin. Oleh sebab itu, secara resmi pejabat struktural tidak menghadiri gelaran. "Saya informasikan, jadi untuk Tugu Jogja Expo itu belum ada izin," ujarnya saat dihubungi wartawan kemarin (12/12). Sumadi pun menyatakan, akan segera menindak gelaran berupa pasar malam itu. Namun, ia belum menentukan jenis tindakan yang akan dilakukan oleh Pemkot Jogja. "Ya, maknanya saya bilang kami akan datang mereka. Segera proses izinnya. Kedua, untuk parkir harus sesuai ketentuan," ungkapnya.

Namun, Sumadi belum menyebut secara tegas, terkait dengan penghentian operasional TJE. "Nanti saya takon (tanyakan) di instansi dengan teman-teman (OPD Pemkot Jogja, Red) ya," tambahnya.

Terpisah, anggota Forum Pemantau Independen Indonesia (FPI) Kota Jogja Baharuddin Kamba pun mempertanyakan sumbu filosofis yang jadi area pasar malam dengan tajuk Tugu Jogja Expo. Menurut informasi yang diperoleh, gelaran berlangsung mulai 8 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. "Kegiatan ini pun beroperasi pukul 12.00-23.00," sebutnya.

Terkait kegiatan tersebut, ada beberapa hal cermatan Forpi Kota Jogja. Pertama izin operasional, baik dari Pemkot Jogja maupun

Pemprov DIJ. "Mengingat lokasi tersebut merupakan kawasan sumbu filosofi atau sumbu imajiner," tegasnya.

Kedua, menurut informasi warga pula ada kegiatan *sunday morning* (sunmor) di lokasi tempat gelaran TJE. Hal ini juga dipertanyakan, terkait dengan izin baik dari Pemkot Jogja, Pemprov DIJ, termasuk izin keramaian dari pihak kepolisian.

Ketiga, Kamba meminta kegiatan TJE dihentikan, jika tidak memiliki izin. "Karena ini menyangkut kewibawaan dari aparat pemerintah setempat. Jika tidak ada tindakan tegas, maka pelanggaran terus terjadi," tandasnya.

Klaim Sempak Dukungan Pemkot

Terpisah, Ketua Penyelenggara TJE Widihasto Wasana Putra mengatakan, berbagai rangkaian tahapan telah dilakukan jauh-jauh hari. Pertama diawali menghadap Pj Wali Kota Jogja Sumadi bulan November untuk memaparkan rencana penyelenggaraan TJE. Dan hasilnya, penyelenggaraan itu telah mendapat dukungan dari pemerintah setempat.

"Beliau menanggapi positif dan prinsip pemkot mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangkitkan perekonomian masyarakat serta menunjang pariwisata seperti event TJE dan hal-hal teknis akan dikoordinasikan.

Dukungan Pj Wali Kota ada di vlog saya di Instagram @hastodiningrat," kata Hasto saat dikonfirmasi kemarin (12/12).

Setelah pertemuan tersebut, panitia kemudian mengirim surat permohonan agar Pemkot Jogja dapat memfasilitasi digelarnya rapat koordinasi teknis terkait penyelenggaraan acara. Namun karena tidak ada kepastian penyelenggaraan rapat di pemkot, pihaknya pun berinisiatif membuat rakor secara mandiri Rabu (7/12) lalu dengan mengundang sejumlah pihak, termasuk Pemkot Jogja. "Tapi dari semua yang kami undang, yang hadir hanya pihak Koramil Jetis dan ketua RW 12 dan RW 12 Jogoyudan," ujarnya.

Tak berhenti di situ, lanjut Hasto, pihaknya juga sudah meminta rekomendasi penyelenggaraan acara kepada UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya pada 5 Desember lalu. Hari berikutnya menyampaikan tanggapan surat itu namun belum juga keluar sampai dengan 8 Desember. Sementara 8 Desember dijadwalkan sudah pembukaan.

"Baru tanggal 9 Desember pukul 19.00 datang surat diantar ke venue yang isinya surat jawaban yang melampirkan surat dari UPT Pengelola Sumbu Filosofi yang tidak merekomendasikan kegiatan TJE," jelasnya.

Tidak direkomendasikan kegiatan itu karena ada sejumlah po-

terensi, antara lain, timbulnya kemacetan karena minimnya lahan parkir dan berpotensi mengancam cagar budaya Hotel Tugu. Hal ini juga dia pertanyakan lantaran penyelenggaraan acara tidak berlokasi di dekat Hotel Tugu.

"Tidak dikeluarkan rekomendasi ini, menurut saya, hal yang sepihak. Karena kami tidak pernah dimintai keterangan even TJE akan seperti apa dan sebagainya. Sementara kami sudah sowan ke Pj Wali Kota dan didukung" terangnya.

Menurutnya, kalau pun pertimbangan adalah faktor kemacetan bisa mengganggu sumbu filosofi, pun tanpa adanya even TJE dinilai kawasan tersebut sudah padat. Terlebih, publik dianggap sudah mengetahui hal itu bahwa Jogja selalu padat kendaraan saat musim-musim liburan karena memang sejauh ini pemkot belum menyediakan kantong-kantong parkir. "Malioboro, Tugu dan sekitarnya tanpa ada even tiap hari sudah *crowded*," tandasnya.

Selain itu, Hasto menyebut jika bicara even TJE ini minim lahan parkir adalah asumsi yang salah. Pihaknya mengklaim telah memplotkan *space* parkir di dalam area. "Dan kalau yang disoal adalah parkir trotoar, even kami hanyalah event temporer dan tidak permanen," tandasnya.

Menurutnya, penyelenggaraan TJE secara konkret memiliki *multiplier effect*, terutama terhadap

perekonomian masyarakat. Lahan kosong yang sebelumnya terbengkalai dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan, seperti pentas seni dan tempat berjualan.

"Termasuk dampak kepada warga kewilayahan, tempat yang sudah puluhan tahun kosong, gelap, kumuh, dijejali pedagang kaki lima bisa kami buka kami bersih-

kan. Pemerintah mestinya senang, kami bisa membangunkan lahan tidur menjadi lahan produktif bagi semua," tambah Hasto. (fat/wia/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005